

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme telah menjadi ancaman global yang tidak mengenal batas negara, yang berdampak luas terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia. Aksi terorisme, baik yang dilakukan oleh kelompok radikal maupun individu yang bertindak sendiri (*lone wolf*), telah merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan kerusakan fisik serta emosional yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, terorisme semakin berkembang menjadi fenomena yang lebih kompleks, dengan berbagai bentuk yang lebih terdesentralisasi dan sulit diprediksi. Pada skala internasional, terorisme telah melibatkan jaringan kelompok ekstremis yang tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Al-Qaeda, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, dan Taliban, yang memiliki tujuan untuk mengubah tatanan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Mereka menggunakan ideologi ekstremis untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda, serta melaksanakan serangan yang dirancang untuk menakut-nakuti masyarakat luas dan mengguncang stabilitas negara.

Serangan besar seperti yang terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Al-Qaeda, telah mengguncang dunia secara fisik dan mengubah kebijakan global terkait keamanan, diplomasi, dan hak asasi manusia. Sejak saat itu, terorisme internasional menjadi ancaman yang lebih luas dan lebih berbahaya, dengan serangan-serangan yang terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika. Kelompok teroris memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi dan media sosial untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda, dan merencanakan serangan. Selain serangan fisik, terorisme internasional juga melibatkan perdagangan senjata ilegal, pendanaan terorisme, dan penggunaan media untuk tujuan radikalisisasi, yang memperburuk ancaman ini dengan memengaruhi individu di luar pusat konflik.

Untuk mengatasi ancaman terorisme internasional, banyak negara membentuk aliansi dan kerjasama multilateral melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Police (INTERPOL)*, dan *European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL)*. Kerja sama antar negara sangat penting untuk mengatasi tantangan terorisme yang sering kali melibatkan jaringan global dan pengaruh lintas batas. Koordinasi pertukaran informasi intelijen, penguatan kapasitas aparat keamanan, serta penegakan hukum yang lebih ketat merupakan bagian dari upaya global untuk menanggulangi aksi terorisme. Dengan demikian, terorisme bukan hanya menjadi ancaman domestik, tetapi juga isu global yang memerlukan respons kolektif dari seluruh komunitas internasional.

Di Indonesia, terorisme telah lama menjadi ancaman serius, dengan sejumlah serangan besar yang mengguncang stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Salah satu peristiwa besar adalah serangan bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melibatkan kelompok teroris internasional, Jamaah Islamiyah (JI). Sejak itu, Indonesia mengalami serangkaian serangan terorisme lainnya, yang semakin menunjukkan bahwa terorisme bukan hanya ancaman dari kelompok internasional, tetapi juga melibatkan kelompok domestik

seperti *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Sebagai respons terhadap ancaman ini, pemerintah Indonesia melalui Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) telah menggagalkan berbagai rencana serangan dan menangkap sejumlah terduga teroris. Meski demikian, ancaman terorisme di Indonesia masih ada, dengan fenomena radikalisasi sosial yang semakin cepat menyebar, terutama di kalangan individu yang merasa terisolasi atau tidak puas dengan kondisi sosial dan politik.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani terorisme, seperti melalui program deradikalisasi, peningkatan kewaspadaan dini, dan penguatan kapasitas aparat keamanan. Salah satu pendekatan penting adalah melibatkan masyarakat dalam deteksi dini ancaman terorisme, melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Namun, meskipun banyak langkah yang telah diambil, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan peran masyarakat yang masih perlu diperkuat, pengawasan terhadap radikalisasi di dunia maya, dan penguatan kerjasama antar lembaga di tingkat nasional dan daerah.

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar di kawasan metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), juga menghadapi ancaman terorisme yang tidak lagi terbatas pada serangan besar atau kekerasan fisik. Kota ini mulai mengalami infiltrasi ideologi ekstrem dan radikalisasi yang mengarah pada tindakan terorisme. Penangkapan sejumlah individu yang terafiliasi dengan kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI), *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, dan lainnya di Bekasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kota ini mulai menjadi titik perhatian dalam pencegahan terorisme. Dalam

menghadapi ancaman ini, pencegahan terorisme di Kota Bekasi memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur, dengan kewaspadaan dini sebagai strategi utama. Kewaspadaan dini bertujuan untuk mendeteksi potensi ancaman terorisme pada tahap awal, sebelum berkembang menjadi aksi terorisme yang lebih besar dan merusak.

Kewaspadaan dini di Kota Bekasi tidak hanya melibatkan aparat keamanan dan pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pihak yang berperan aktif dalam mendeteksi dan melaporkan potensi ancaman. Hal ini tercermin dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD-PE), yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah penyebaran ideologi ekstrem dan radikalisasi. Namun, implementasi strategi kewaspadaan dini ini menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan yang memadai, serta resistansi dari sebagian masyarakat untuk terlibat dalam proses deteksi dini.

Di tengah berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi kewaspadaan dini, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan potensi ancaman, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melakukan sejumlah upaya konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi kepada aparatur dan masyarakat menjadi langkah utama dalam memperkuat pemahaman kolektif terhadap pentingnya deteksi dini terhadap potensi terorisme. Kegiatan seperti seminar, sosialisasi, dan penyuluhan diselenggarakan secara berkala untuk membangun kesadaran serta menumbuhkan rasa tanggung

jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berupaya mengembangkan sistem komunikasi yang lebih responsif dan terbuka antara lembaga pemerintah dan elemen masyarakat, guna mempercepat proses pelaporan dan respons terhadap indikasi ancaman. Pemanfaatan teknologi informasi juga dimaksimalkan sebagai sarana untuk memperlancar pertukaran data, memperkuat koordinasi internal, serta mendukung keterpaduan langkah pencegahan yang lebih sistematis dan terstruktur.

Pencegahan terorisme di Kota Bekasi memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dan sistematis, dengan mengandalkan kewaspadaan dini sebagai langkah preventif utama. Kewaspadaan dini ini dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dan merespons ancaman yang muncul lebih awal sebelum berkembang menjadi aksi terorisme yang lebih besar. Dalam konteks Bekasi, kewaspadaan dini menjadi sangat relevan karena pola terorisme kini lebih berbasis pada sel-sel kecil atau individu-individu yang bertindak sendiri (*lone wolf*), yang membuatnya lebih sulit untuk dideteksi dan dicegah secara efektif. Oleh karena itu, kewaspadaan dini tidak hanya membutuhkan koordinasi antar lembaga, tetapi juga kesadaran kolektif dan kontribusi aktif dari masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan potensi ancaman.

Ancaman terorisme harus dipandang sebagai masalah yang memerlukan respons luar biasa karena dianggap mengancam eksistensi suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks ini, terorisme bukan hanya ancaman fisik yang dapat dilihat melalui serangan berskala besar, tetapi juga ancaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai sosial, politik, dan identitas kolektif masyarakat. Isu-isu seperti

terorisme, yang memiliki potensi merusak stabilitas sosial dan politik, perlu diangkat ke dalam diskursus keamanan yang lebih luas dan mendapatkan respons dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kewaspadaan dini terhadap terorisme harus dipahami sebagai upaya untuk mengelola ancaman ini secara lebih komprehensif dan holistik (Wæver & Wilde, 1998)

Pencegahan terorisme berbasis masyarakat sangat penting, di mana peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dini aktivitas mencurigakan dan memberikan informasi kepada pihak berwenang menjadi kunci utama. Masyarakat berfungsi strategis dalam mengidentifikasi tanda-tanda radikalasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar mereka. Di Kota Bekasi, dengan populasi heterogen dan beragam latar belakang sosial ekonomi, pendekatan berbasis komunitas diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pencegahan, tetapi juga aktor yang aktif berkontribusi dalam deteksi dan pencegahan terorisme. Program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya radikalasi serta cara melaporkan aktivitas mencurigakan secara aman harus dikembangkan sebagai bagian dari upaya ini (Schmid, 2021).

Proses radikalasi yang dialami oleh individu atau kelompok yang dapat berujung pada aksi terorisme terjadi secara bertahap, dimulai dari pengalaman marginalisasi atau ketidakpuasan sosial yang kemudian mengarah pada keterjeruman ke dalam ideologi ekstremis. Tahapan ini bermula dengan ketidakpuasan sosial dan berakhir pada tindakan kekerasan. Dalam konteks kewaspadaan dini, deteksi indikasi awal radikalasi seperti isolasi sosial, peningkatan ketidakpuasan terhadap sistem, atau paparan terhadap ideologi

ekstremis menjadi sangat penting sebagai kunci pencegahan berkembangnya ancaman terorisme. Pencegahan yang berfokus pada identifikasi tahapan radikalisasi ini dapat membantu kewaspadaan dini di tingkat lokal melalui pemantauan perubahan sikap sosial dan perilaku individu di lingkungan sekitar (Moghaddam, 2005).

Konsep kontrol sosial menekankan bagaimana masyarakat modern mengatur perilaku individu dan kelompok dalam konteks kejahatan dan ancaman sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks, kontrol terhadap perilaku individu tidak hanya bergantung pada tindakan formal dari negara seperti hukum dan polisi, tetapi juga melibatkan pengawasan sosial yang lebih luas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pencegahan terorisme, kolaborasi antara masyarakat dan lembaga negara sangat penting untuk menciptakan sistem kontrol sosial yang efektif, termasuk pengawasan bersama terhadap perilaku mencurigakan dan deteksi dini potensi radikalisasi guna mencegah tindakan terorisme sebelum terjadi. Di Kota Bekasi, dengan keragaman sosial dan ekonomi yang ada, masyarakat harus dilibatkan sebagai garda depan pengawasan sosial dan pencegahan terorisme. Dengan kewaspadaan dini berbasis masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan melaporkan potensi ancaman menjadi sangat krusial, sehingga mereka bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam upaya pencegahan (Garland, 2002).

Kewaspadaan dini merupakan alat penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman terorisme yang berasal dari individu atau kelompok yang terisolasi atau mengalami radikalisasi. Pencegahan terorisme perlu melibatkan pendekatan yang

lebih manusiawi, seperti penyuluhan sosial dan intervensi berbasis masyarakat. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pemberdayaan komunitas yang dapat secara langsung mendeteksi dan mengintervensi individu yang berpotensi terlibat dalam radikalasi. Oleh karena itu, penerapan kewaspadaan dini berbasis komunitas di Kota Bekasi sangat relevan untuk mendeteksi gejala radikalasi sejak tahap awal (Horgan, 2008).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang cukup rawan dan strategis dalam konteks penangkapan individu yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Data berikut menunjukkan sejumlah penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, yang melibatkan pelaku dengan berbagai latar belakang, mulai dari profesional, tokoh agama, hingga pimpinan organisasi radikal. Tabel ini menggambarkan bagaimana pola rekrutmen, pendanaan, serta penyebaran ideologi ekstremis semakin berkembang secara tersembunyi namun sistematis di wilayah Bekasi.

Tabel 1.1 Penangkapan Terduga Teroris di Kota Bekasi

| No. | Tahun | Nama / Inisial | Keterangan / Afiliasi | Lokasi Penangkapan | Sumber Referensi |
|-----|-------|-------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2021 | S alias MT | Karyawan PT Kimia Farma, anggota dan pembina <i>Perisai Nusantara Esa Jamaah Islamiyah (JI)</i> | Bekasi | (Uly & Sukmana, 2021) |
| 2 | 2021 | Farid Ahmad Okbah | Tokoh agama, afiliasi Jamaah Islamiyah (JI), penggalangan dana lewat lembaga filantropi | Bekasi | (Dirgantara, 2021) |
| 3 | 2021 | Ahmad | Tokoh agama, | Bekasi | (Dirgantara, |

| | | | | | |
|---|------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| | | Zain An-Najah | afiliasi Jamaah Islamiyah (JI), pendanaan terorisme | | 2021) |
| 4 | 2021 | Anung Al-Hamad | Afiliasi Jamaah Islamiyah (JI), pengumpulan dana untuk kegiatan terorisme | Bekasi | (Dirgantara, 2021) |
| 5 | 2022 | Abdul Qadir Hasan Baraja | Pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, penyebaran ideologi anti-Pancasila | Bekasi | (detikNews, 2023) |
| 6 | 2023 | Dananjaya Erbening | Pegawai PT KAI, simpatisan ISIS, penyebar propaganda via media sosial | Bekasi | (Sumardi, 2023) |
| 7 | 2024 | FNA dan DF | Ditemukan dokumen & buku terkait aktivitas terorisme, jaringan baru terdesentralisasi | Bekasi Timur & Rawalumbu | (Kurniawan & Maullana, 2024) |

Penangkapan-penangkapan terduga teroris di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya nyata, tetapi juga semakin kompleks. Pola penyebaran yang terdesentralisasi dan penyamaran pelaku di balik profesi sosial yang legal menjadikan deteksi dini terhadap potensi terorisme semakin menantang. Dalam konteks ini, strategi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen menjadi instrumen penting yang harus dijalankan secara sinergis untuk merespons dan mencegah ancaman tersebut secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja

Sama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam pencegahan terorisme. Fokus utama penelitian ini mencakup: (1) analisis terhadap implementasi strategi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen yang dilakukan dalam merespons potensi radikalisme dan terorisme di wilayah Kota Bekasi; (2) identifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan strategi tersebut, baik dari aspek kelembagaan, koordinasi, maupun partisipasi masyarakat; serta (3) penelusuran upaya-upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol dan aktor-aktor terkait dalam mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan efektivitas strategi pencegahan terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali informasi dari aparatur pemerintah, unsur keamanan, serta elemen masyarakat sipil yang terlibat langsung dalam proses deteksi dan antisipasi dini terhadap potensi radikalisme. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan kebijakan pencegahan terorisme yang lebih adaptif dan komprehensif, khususnya berbasis penguatan sistem kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen di tingkat lokal. Dengan demikian, strategi yang dijalankan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan dalam membangun ketahanan daerah terhadap ancaman terorisme.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan membahas berbagai aspek penting dalam upaya pencegahan terorisme di Kota Bekasi, dengan fokus pada strategi yang dijalankan oleh Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Penelitian ini menelaah

bagaimana strategi kewaspadaan dini diterapkan secara praktis dalam mendeteksi serta mencegah potensi ancaman terorisme sejak dini. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam pencegahan terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan strategi kewaspadaan dini dalam pencegahan terorisme di Kota Bekasi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan strategi kewaspadaan dini di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan strategi pencegahan terorisme di Kota Bekasi, khususnya yang dijalankan oleh Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Penelitian ini diarahkan untuk:

1. Untuk mengetahui strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam pencegahan terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan strategi kewaspadaan dini dalam pencegahan terorisme di Kota Bekasi.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan strategi kewaspadaan dini di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Pada signifikansi akademik ini peneliti menggunakan 10 jurnal penelitian terdahulu sebagai bahan acuan referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme di Kota Bekasi dalam konteks penanggulangan terorisme.

Penelitian pertama (Handayani, 2023) berjudul “Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini dalam Pencegahan Radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat” menunjukkan bahwa strategi deteksi dan cegah dini memiliki peran penting dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme di tingkat lokal. Namun, hasil temuan mengungkapkan bahwa pelaksanaannya masih belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini yang berjudul “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi” terletak pada fokus yang sama, yakni upaya pencegahan terhadap ancaman ideologi ekstrem dan kekerasan. Penelitian ini melanjutkan dan memperluas ruang lingkup kajian dengan tidak hanya melihat aspek kewaspadaan dini, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama intelijen sebagai strategi integral dalam menghadapi ancaman terorisme. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bentuk strategi yang lebih komprehensif, termasuk

identifikasi hambatan dan peluang dalam penerapan strategi tersebut di Kota Bekasi.

Penelitian kedua (Lusein et al., 2020) berjudul “Sinergitas Komunitas Intelijen Daerah dalam Membantu Pencegahan Potensi Konflik di Kota Surabaya Tahun 2018 (Studi Kasus: Teror Bom 3 Gereja)” memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini yang berjudul “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi”. Kedua penelitian sama-sama mengangkat isu pencegahan terorisme melalui pendekatan intelijen, dengan penekanan pada pentingnya koordinasi antarlembaga, sinergi antaraktor, serta efektivitas strategi pencegahan di tingkat daerah. Penelitian terdahulu menyoroti pelaksanaan sinergitas Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Surabaya yang masih menghadapi kendala pada aspek anggaran, SDM, dan ego sektoral, yang menjadi pelajaran penting bagi daerah lain, termasuk Kota Bekasi, dalam membangun sistem kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen yang optimal. Dengan membandingkan konteks Surabaya dan Bekasi, penelitian ini melanjutkan urgensi untuk menelaah lebih dalam strategi serta hambatan dan peluang dalam upaya pencegahan terorisme, khususnya melalui penguatan fungsi kewaspadaan dini dan peningkatan kerja sama intelijen yang terintegrasi di daerah.

Penelitian ketiga (Rusfiana & Hanifah, 2021) berjudul “Analisis Kapasitas dan Sinergi Aparat Kewilayahan dalam Deteksi Dini Aksi Terorisme” menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan sinergi antara aparat TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mendeteksi secara dini potensi ancaman terorisme,

khususnya di wilayah strategis seperti DKI Jakarta. Penelitian tersebut menekankan bahwa tidak ada satu institusi pun yang dapat bekerja secara parsial dalam menghadapi ancaman terorisme, sehingga dibutuhkan koordinasi yang solid dan terpadu antar lembaga. Relevansi dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini, yaitu “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi”, terletak pada fokus yang sama terhadap pentingnya deteksi dini dan kerja kolaboratif lintas sektor. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan aspek kapasitas dan sinergi kelembagaan secara umum, maka penelitian ini memperdalam aspek strategi operasional kewaspadaan dini serta pola kerja sama intelijen secara lebih spesifik di tingkat lokal (Kota Bekasi) dalam upaya pencegahan terorisme. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pelengkap dan pengembangan dari studi sebelumnya dengan fokus wilayah dan pendekatan yang lebih terarah pada strategi pencegahan.

Penelitian keempat (Taufik, 2018) berjudul “Berebut Kuasa Rumah Tuhan: Ekspansi Ideologi Radikal Melalui Masjid di Kota Bekasi” mengungkap bagaimana masjid-masjid di Kota Bekasi telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal sebagai sarana penyebaran ideologi, bahkan hingga mendukung jaringan teroris seperti ISIS. Penelitian ini menyoroti lemahnya deteksi dini terhadap infiltrasi ideologi ekstrem, serta kurangnya pengetahuan mengenai modus ekspansi kelompok radikal tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Kota Bekasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis dan tersembunyi, menyebar melalui institusi sosial keagamaan. Dalam konteks ini, penelitian dengan judul “Strategi

Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi” menjadi relevan sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan keamanan non-tradisional. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana strategi kewaspadaan dini dan pola kerja sama intelijen dapat digunakan untuk mendeteksi serta mencegah potensi ancaman terorisme, termasuk ekspansi ideologi radikal di ruang-ruang keagamaan. Dengan kata lain, penelitian ini melanjutkan dan memperluas temuan sebelumnya dengan pendekatan yang lebih strategis dan institusional dalam mencegah berkembangnya radikalisme di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi.

Penelitian kelima (Lopulalan et al., 2017) berjudul “Penerapan Komunikasi Sosial (Komsos) dalam Mendeteksi dan Mencegah Aksi Terorisme di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung” memiliki relevansi yang erat dengan penelitian ini yang berjudul “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi”. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman terorisme melalui pendekatan non-militer yang melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya menekankan peran komunikasi sosial oleh aparat TNI dalam membangun hubungan dengan masyarakat guna mendeteksi potensi radikalisme dan terorisme. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang mengkaji strategi kewaspadaan dini dan sinergi kerja sama intelijen sebagai bagian dari upaya kolaboratif antara aktor negara dan non-negara. Perbedaan terletak pada fokus pendekatan: penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada fungsi komunikasi sosial di lingkungan militer, sementara

penelitian ini mengarah pada strategi kelembagaan di bidang kewaspadaan dini serta pola koordinasi lintas sektor dalam kerja sama intelijen di wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif penanganan terorisme dari pendekatan interpersonal ke arah pendekatan strategis dan kelembagaan.

Penelitian keenam (Nainggolan, 2016) berjudul “Ancaman ISIS/IS di Indonesia” menyoroti meningkatnya pengaruh dan aktivitas kelompok teroris ISIS/IS di Indonesia serta pentingnya kesiapsiagaan aparat keamanan dalam mencegah dan menanggulangi serangan mereka. Temuan tersebut memperkuat urgensi perlunya strategi pencegahan yang lebih efektif di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penelitian dengan judul “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi” menjadi sangat relevan, karena berfokus pada upaya konkret yang dilakukan oleh instansi lokal dalam merespons potensi ancaman terorisme melalui pendekatan kewaspadaan dini dan koordinasi intelijen. Dengan mengkaji strategi yang diterapkan di Kota Bekasi, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menjadi garda terdepan dalam menghadapi jaringan teror global yang beroperasi hingga ke level lokal.

Penelitian ketujuh (Ainurridho et al., 2023) Penelitian terdahulu yang berjudul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisisasi dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2018” menekankan pentingnya pendekatan deradikalisisasi sebagai strategi

pencegahan jangka panjang terhadap tindak pidana terorisme. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek normatif dan pendekatan interdisipliner dalam mengubah pemahaman radikal melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini relevan dengan judul yang sedang diteliti, yaitu “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi”, karena keduanya menyoroti pentingnya upaya pencegahan sebelum aksi terorisme terjadi. Namun, penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada aspek strategis kelembagaan dan operasional, khususnya dalam konteks peran kewaspadaan dini dan koordinasi intelijen di tingkat daerah. Relevansi keduanya terletak pada pandangan bahwa keberhasilan pencegahan terorisme membutuhkan pendekatan kolaboratif antara negara dan masyarakat, baik dalam membangun kesadaran melalui deradikalisasi maupun dalam meningkatkan kesiapsiagaan melalui sistem deteksi dini dan kerja sama intelijen yang terkoordinasi dengan baik.

Penelitian kedelapan (Setiawan, 2020) Penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi” memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti pentingnya deteksi dini dan kerja sama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan wilayah. Dalam penelitian tersebut, pendekatan Polmas atau *community policing* digunakan oleh Bhabinkamtibmas sebagai bentuk strategi pencegahan terhadap tawuran, yang merupakan bentuk ancaman sosial di lingkungan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada strategi kewaspadaan dini dan kerja

sama intelijen dalam mencegah terorisme, yang merupakan ancaman dengan skala lebih luas dan kompleks. Keduanya menggarisbawahi pentingnya peran sinergis antara aktor negara, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan yang responsif dan antisipatif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan upaya deteksi dini, tidak hanya pada konflik horizontal seperti tawuran, tetapi juga pada bentuk ancaman ekstremisme dan terorisme melalui pendekatan strategis berbasis intelijen dan kolaborasi multi-sektor.

Penelitian kesembilan (Triwaskito & Puteh, 2018) berjudul “Negara dan Upaya Deteksi Dini Terhadap Ideologi Radikalisme” menekankan pentingnya pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menangani kasus terorisme di Indonesia, dengan menitikberatkan pada peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi atau potensi tindakan teror. Relevansi dengan penelitian ini yang berjudul “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi” terletak pada kesamaan fokus terhadap pentingnya deteksi dan intervensi dini. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan pada pendekatan ideologis dan sosial masyarakat terhadap radikalisme, maka penelitian ini memperluas cakupan dengan melihat strategi kelembagaan bidang kewaspadaan dini dan mekanisme kerja sama intelijen sebagai bagian integral dari upaya pencegahan. Keduanya menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan terorisme tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau tindakan represif, tetapi juga pada penguatan sistem deteksi dini dan sinergi antara negara dan masyarakat.

Penelitian kesepuluh (Prajogo, 2022) berjudul “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN *Our Eyes Initiative (OEI)* untuk Memerangi Terorisme di Kawasan” menyoroti pentingnya peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong kerja sama pertukaran informasi intelijen strategis di tingkat regional untuk mendeteksi dini ancaman terorisme. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama dalam memerangi terorisme sangat bergantung pada sinergi antar aktor, penyatuan visi, dan pengelolaan perbedaan struktural dan budaya antar negara. Relevansi ini menjadi dasar penting bagi penelitian yang berjudul “Strategi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam Pencegahan Terorisme pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi”, karena meskipun fokusnya berada pada tataran lokal, prinsip-prinsip strategis yang digunakan dalam ASEAN *Our Eyes Initiative (OEI)* juga tercermin dalam upaya pemerintah daerah, khususnya melalui sinergi antar lembaga intelijen dan penguatan sistem deteksi dini. Dengan menelaah strategi dan pola kerja sama di tingkat kota, penelitian ini melengkapi wacana yang sebelumnya dikaji dalam konteks regional, sehingga dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai bagaimana strategi pencegahan terorisme dibangun secara berlapis dari lokal hingga internasional.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menyoroti strategi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen dalam pencegahan terorisme yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, tanpa mengandalkan koordinasi lintas lembaga. Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaksanaan strategi, hambatan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia dan resistansi masyarakat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi

hambatan tersebut, seperti peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan komunikasi dengan masyarakat. Pendekatan yang digunakan memperlihatkan model pencegahan terorisme yang lebih mandiri, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan dinamika sosial di tingkat lokal.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat akademis dan praktis bagi peneliti dalam memperluas wawasan mengenai strategi pencegahan terorisme di tingkat lokal, dengan menekankan pada pelaksanaan strategi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengkaji secara langsung kebijakan serta praktik yang dijalankan oleh lembaga pemerintah daerah, termasuk peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Penelitian ini juga menjadi kontribusi ilmiah yang relevan dalam memahami hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, serta cara-cara yang digunakan untuk mengatasinya.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional, dalam merumuskan kebijakan pencegahan terorisme yang lebih efektif dan kontekstual. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap strategi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen yang telah diterapkan, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan resistansi sosial. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang

dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi kewaspadaan dini dijalankan di wilayahnya, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikannya. Dengan menyoroti hambatan-hambatan yang timbul dari dinamika sosial dan partisipasi publik yang belum maksimal, masyarakat dapat memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam mendukung upaya pencegahan terorisme. Penelitian ini juga mendorong terbentuknya kesadaran bersama bahwa mengatasi hambatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kontribusi masyarakat secara kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap ancaman radikalisme.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari permasalahan yang melatarbelakangi atau alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam kerangka teori biasanya terdiri dari definisi variabel, dimensi (aspek/prinsip prinsip/faktor-faktor yang memengaruhi atau hal-hal lain yang relevan dan terkait dengan variabel penelitian).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan serta pemahaman mengenai metode yang dipergunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait objek penelitian serta perolehan penelitian dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.